PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BANK INDONESIA (BI)**

UNIT KERJA : **KPW PROVINSI SULAWESI UTARA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO SUPRATIKTO**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **260847**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.381.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 852.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 427.000.000
3. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
4. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.175.000.000
5. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 2.462.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 748.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SRZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV 2.0 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOTOR, ROYAL ENFIELD CLASSIC 350 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.774.366.839**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	6.249.370.619
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.910.946.852
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	1.483.929.653
	Sub Total	Rp.	21.547.613.963
III.	HUTANG	Rp.	268.702.777
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	21.278.911.186

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.